

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur semasa menjabat sebagai presiden mengumandangkan rekonsiliasi dengan orang-orang yang dikatakan komunis. Selanjutnya, ia mengusulkan pencabutan TAP MPRS XXV/1966 yang mengatur komunisme, marxisme, dan leninisme. Masyarakat –ditunggangi lawan politiknya- bukan menyambut, justru menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Peristiwa ini tidak hanya menggambarkan kekalahan Gus Dur, tapi juga menunjukkan bahwa reformasi belum menyentuh sejarah. Luka sejarah itu masih ada.

Perseteraan melawan imperialisme telah membawa komunisme yang digalang oleh Partai komunis Indonesia (PKI) ke dalam kancah konflik yang rumit: Persaingan politik antara Soekarno dan PKI dengan Angkatan Darat yang memuncak berupa Gerakan 30 September pada tahun 1965. Perjuangan PKI dengan ideologi komunisnya untuk merubah sistem sosial politik yang ada justru membawanya ke dalam konflik yang lebih substansial, dan berujung pada hancur leburnya PKI sebagai partai serta luluh lantaknya komunisme sebagai sebuah ideologi. Imbasnya: semua organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap *underbouw* PKI diberangus. Salah satunya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra.

Lembaga Kebudayaan Rakyat atau kerap disingkat Lekra adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Indonesia. Selain juga berusaha menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kerakyatan dan kemanusiaan melalui karya-karya yang ditelurkan oleh para senimannya. Lekra memang memiliki kedekatan ideologis dengan PKI. Walau Lekra menolak untuk ‘dimerahkan’ oleh PKI.¹ Kedekatan ini timbul karena Lekra maupun PKI sama-sama memperjuangkan rakyat miskin. Selain itu, beberapa pendiri Lekra adalah juga anggota PKI.

¹ Rhoma Dwi Aria Yuliantri & Muhidin M. Dahlan, *Lekra Tak Membakar Buku* (Yogyakarta, 2008), hal. 59

Akibatnya, setelah peristiwa G30S, Lekra dituduh organisasi masyarakat yang berdiri di bawah PKI. Selanjutnya diberangus oleh Orde Baru dengan alasan mengancam stabilitas keamanan nasional. Pemerintah bahkan mengumandangkan propaganda bahwa Lekra adalah komunis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan, bukanlah rahasia lagi bahwa karya-karya berlabelkan Lekra tersebut diberi stigma komunis oleh penguasa pada masa itu. Tidak cukup di situ, penguasa melalui pemerintah memusnahkan data dan sejarah Lekra untuk selanjutnya disenyapkan dari ruang sejarah politik Indonesia. supaya tidak bisa dipelajari oleh generasi berikutnya.

Stigma Lekra sebagai antek PKI yang notabene komunis ditancapkan. Banyak senimannya dibuang ke Pulau Buru selama puluhan tahun, terasing dari perkembangan Indonesia modern, bahkan tak terjangkau. Sisanya mengalami pengebirian intelektualitas. Mereka dilarang untuk berkarya. Salah satu contohnya adalah Hersri Setiawan - penulis, penerjemah, dan sejarawan Indonesia yang pernah menulis buku berjudul Memoar Pulau Buru - harus menggunakan nama lain dalam berkarya, karena takut ketahuan. Stigma komunis ini terus melekat pada mereka, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk membaur kembali dengan masyarakat sepulang dari pengasingan. Orang di luar Lekra yang menunjukkan sikap mendukung Lekra akan dianggap sebagai anti komunis, anti Pancasila, bahkan bisa dicap subversif sehingga perlu dibui.

Sepuluh tahun lebih sudah berlalu, sejak sekelompok masyarakat menggaungkan reformasi, yang kabarnya adalah upaya untuk perbaikan bangsa, diawali di sektor ekonomi. Tapi, ada satu hal yang terlupakan oleh bangsa ini, yaitu pembongkaran sejarah bangsa Indonesia, khususnya politik, yang disenyapkan oleh rezim yang menempati posisi sebagai penguasa pada masa dahulu.

1.2. Pokok Permasalahan

Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra adalah lembaga yang salah satunya mengalami pengaburan makna realitas: siapa Lekra itu sebenarnya. Pemaknaan bahwa Lekra adalah sebuah kumpulan seniman-seniman kiri alias

atheis yang mengkhianati Pancasila khususnya sila pertama adalah cerita yang dinyanyikan oleh Orde Baru.

Doktrin atau propaganda politik ini dimunculkan di pelbagai media massa yang diikuti pelbagai aksi menentang Lekra. Doktrin ini sendiri digunakan untuk melegitimasi perilaku penguasa Orde Baru untuk mendiskreditkan dan mengeliminasi komunis yang beranakkan Lekra. Dengan begitu, penguasa Orde Baru dapat melanggengkan kekuasaannya dan bahkan memperluas hingga ke ranah privat: Pikiran manusia.

Penghancuran terhadap Lekra dimulai dengan hadirnya jargon-jargon anti komunis pasca Gerakan 30 September. Penghancuran ini sendiri bukan hanya menghapuskan sebuah golongan atau kelompok, melainkan menghancurkan sistem lama guna membangun sebuah sistem baru dengan alasan stabilitas politik demi pembangunan. Oleh karena itulah, penguasa Orde Baru berusaha menciptakan sebuah 'musuh bersama' yaitu penciptaan stigmatisasi terhadap lawan-lawannya.

Landasan pemikiran ini sendiri dibangun berdasarkan paradigma Orde Baru, yaitu pembangunan yang berlandaskan pada stabilitas politik yang mengandalkan kekuatan militer guna melanggengkan kekuasaannya. Dengan kata lain, Orde Baru membangun sebuah sistem yang bebas ideologi, yaitu ideologi yang bebas dari ideologi di luar dirinya.

Ideologi pembangunan itu sendiri lahir pada paruh kedua tahun 1960-an, yaitu ketika para intelektual Indonesia mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran barat. Gagasan ini lalu diterima dengan tangan terbuka oleh kaum militer. Alasannya: kaum militer dapat menjadi motor penggerak dari pembangunan melalui konsep sistem perwakilan fungsional. Stabilitas politik itu sendiri kemudian dibangun oleh Orde Baru dengan dua cara, antara lain *pertama*, penumbangan Orde Lama melalui peristiwa G30S; *kedua*, penciptaan musuh bersama. Kedua hal ini selanjutnya diarahkan kepada penghancuran kekuatan komunis dan Soekarno sebagai penopang kuat dari Orde Lama.

Pembantaian terhadap mereka yang diduga anggota PKI oleh kaum anti komunis setelah pemberontakan PKI pada tahun 1948 juga adalah salah satu wujud dari *hate crime*. *Hate crime* adalah tindak kejahatan yang terjadi akibat

dorongan rasa benci seseorang atau sekelompok orang terhadap kaum minoritas atau kaum yang lebih lemah. Bentuk tindak kejahatan itu bisa berupa tindak kekerasan fisik, stigmatisasi, dan perusakan harta benda pribadi.² Contoh nyata lainnya yang terjadi adalah penyebaran kebencian terhadap orang kulit hitam oleh Ku Klux Klan, genosida di Rwanda, dan pembantaian etnis di Bosnia.

Stigmatisasi adalah bentuk yang lahir dari *hate crime*. Tak jarang, hal ini melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti tindak kekerasan fisik. Ironisnya, *hate crime* tidak hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat, melainkan juga oleh penguasa terhadap kelompok yang dianggap mengancam kekuasaannya. Disinilah, penguasa mewakili negara tidak bisa dilihat melakukan tindak kejahatan (*state crime*), karena ia tidaklah mungkin melanggar hukum yang dibuat oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, penyebaran *hate crime* yang dilakukan oleh negara kerap disebut sebagai *state violence* atau kekerasan oleh negara.³

Penguasa sebagai wakil negara tidak bisa bersih dari citra penindas. Tak ayal perilaku penindasan tersebut dilegalisasikan dalam bentuk undang-undang atau aturan yang kemudian disosialisasikan dalam masyarakat. Disinilah terjadi hegemonisasi ideologi penguasa melalui media corong miliknya, sehingga masyarakat kemudian merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang lazim dan sudah seyogiannya untuk dipatuhi. Walau hal tersebut belum tentu benar.

Penguasa Orde Baru menggunakan media –baik cetak maupun elektronik, buku-buku, dan berbagai media lainnya sebagai mesin-mesin propaganda yang bergerak leluasa untuk mempengaruhi dan merekayasa persepsi publik sejak peristiwa-peristiwa politik pada tahun 1965. Kisah-kisah heroik Suharto – penguasa Orde Baru saat memberantas komunis pun kerap menghiasi buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah. Selain itu, sekolah-sekolah juga mewajibkan para siswanya untuk menonton pemutaran film “G30S/PKI” setiap tanggal 30 September. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) juga berlangsung di sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintah untuk mendekonstruksi propaganda politik Orde Baru.

² James B. Jacobs & Kimberly A. Potter, “Hate Crimes: A Critical Perspective,” *Crime and Justice*, Vol. 22 (Chicago, 1997), hal. 3

³ *Ibid*

Propaganda sendiri memiliki arti sebuah bentuk *language game* yang secara sistematis mempermainkan ide-ide ketertutupan dan keterbukaan, kebeningan dan kekaburan, keterlihatan dan ketersembunyian, sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang seolah-olah mengandung kebenaran sejati.⁴ Propaganda politik adalah sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak, yang menyembunyikan pemaksaan interpretasi dan realitas, maka dia dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kekerasan. Ia juga bukan hanya sebuah bentuk dominasi terhadap interpretasi realitas yang digunakan melalui media komunikasi, melainkan dipaksakan sedemikian rupa sehingga dapat diakui secara salah sebagai definisi realitas yang legal.

Stigmatisasi terhadap Lekra merupakan salah satu bentuk kekerasan negara. Ia mendekonstruksi suatu persepsi terhadap wadah penyalur aspirasi rakyat yang dapat mengancam kelanggengan eksistensi penguasa, yaitu Orde Baru. Proses dominasi melalui distorsi sejarah ini dapat berjalan halus selama puluhan tahun, sehingga tak disadari, bahkan dianggap sebagai sebuah dasar kebenaran. Walau sebetulnya, semua ini adalah suatu rangkaian realitas palsu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti dan mengelaborasi berdasarkan pertanyaan sebagai berikut:

- Mengapa kekerasan tersebut dilakukan oleh negara?
- Bagaimana bentuk stigmatisasi negara terhadap Lekra?

Pertanyaan tersebut menggelitik penulis, karena kecenderungan-kecenderungan perilaku Orde Baru tersebut di atas mulai nampak kembali melalui pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dewasa ini. Misalnya saja, pelarangan pelanjutan *syuting* film “Lastri” yang dianggap berbau komunis⁵; pemeriksaan isi buku “Dalih Pembunuhan Massal” yang ditulis oleh John Roosa, karena dianggap penyesatan sejarah peristiwa G30S⁶; dan, penarikan kembali buku “Lekra Tak Membakar Buku,” karena sampul depan buku bergambar palu

⁴ Arief Adityawan. S., *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia* (Jakarta, 2008), hal. 35

⁵ Bisa diakses di <http://www.ajiindonesia.org/index.php?fa=alert.read&id=MzI3&lang=en>

⁶ Bisa diakses di <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=KOLOM+IBRAHIM+ISA%3A+Karya+Joh+n+Roosa%2c>

dan arit yang merupakan lambang komunis⁷. Padahal, buku-buku lain yang bernuansa *hate*, seperti anti-Kristen dan anti-Cina dibiarkan bertebaran.

1.3. Tujuan Penelitian

Pada umumnya, penguasa ingin melanggengkan kekuasaannya. Dan, salah satu cara untuk hal tersebut adalah dengan menempatkan rakyatnya sebagai musuh negara. Mereka secara sistematis melakukan stigmatisasi yang menempatkan rakyat sebagai musuh negara dan musuh masyarakat, sehingga negara memiliki justifikasi untuk memberangusnya.

Salah satu momok yang ditempatkan oleh Orde Baru sebagai musuh negara adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang selanjutnya diberi stigma. Aktivis-aktivisnya kemudian ditangkap, dibunuh atau diasingkan. Dalam tesis ini, penulis ingin menjawab latar belakang negara melakukan penyebaran kebencian (*hate crime*) dengan cara menjabarkan garis besar strategi stigmatisasi di dua aras, yaitu struktural dan kultural. Selanjutnya mengaitkan stigmatisasi terhadap Lekra dengan upaya negara Orde Baru untuk melakukan perlindungan terhadap ideologi dan strategi politik yang dikembangkan Orde Baru dengan pilar-pilar struktur politik yang stabil dan bebas dari oposisi politik.

Disinilah penelitian ini ingin melakukan penguakan salah satu sudut pandang terhadap sejarah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang kriminologis. Stigma antek PKI yang diberikan oleh negara terhadap Lekra adalah salah satu bentuk dari *state violence*. Artinya, ketika seseorang atau sekelompok orang menerima stigma dari negara, maka hal ini bisa berakibat pada pengerangkengan seluruh aspek kehidupannya, seperti hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Singkat kata, Penelitian ini ingin memaparkan politik stigmatisasi sebagai salah satu perangkat untuk membangun kekuasaan.

⁷ Bisa diakses di http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=66588

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang Penulis harapkan:

- Secara akademis mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai politik stigmatisasi oleh negara terhadap Lekra sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan (*state violence*), terutama penelitian mengenai Lekra sebagai ormas yang dituduh *underbouw* PKI belum banyak diangkat. Padahal stigmatisasi terhadap Lekra adalah salah satu bentuk dari ekspresi rasa benci penguasa terhadap Lekra yang dianggap lawan politiknya. Stigmatisasi itu sendiri kemudian berujung pada pengungkungan hak individu dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan, hal ini bisa diartikan sebagai aksi kekerasan yang menjadi bagian dari studi kriminologi. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kajian untuk memperkaya sudut pandang sejarah Indonesia, dan mengembangkan kajian-kajian kriminologi sebagai cabang dari ilmu sosial.
- Secara praktis dapat dipakai sebagai bahan telaah kritis mengenai negara yang seharusnya menjadi pelindung bagi warganegaranya dapat melakukan kekerasan terhadap warganegaranya melalui pemberitaan di media massa.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian akan melihat secara umum proses stigmatisasi yang digulirkan oleh cikal bakal penguasa Orde Baru. Proses tersebut adalah upaya untuk menciptakan musuh bersama dengan cara terus menerus memuat artikel atau berita mengenai PKI dan ormas-ormasnya. Penulis membatasi ormas dengan memfokuskan pada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Hal ini dilakukan, karena masih ada kontroversi mengenai “pemerahan” Lekra. Di satu sisi, Lekra kerap menggaungkan bahwa dirinya bukanlah *underbouw* dari PKI. Namun, di sisi lain, pemberitaan pada harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha telak-telak mencantumkan bahwa Lekra adalah ormas dari PKI yang terlibat dalam G30S.

1.6. Pembabakan

Untuk mempermudah hasil penelitian, maka Penulis membagi tesis ini dengan pembabakan sebagai berikut:

- BAB 1, *Pendahuluan*, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, subyek penelitian, dan pembabakan.
- BAB 2, *Tinjauan Pustaka*, menyajikan paparan konteks penelitian, kerangka teori, konsep stigmatisasi dan *hate crime*, dan konsep kekerasan oleh negara.
- BAB 3, *Metode Penelitian*, berisi penjelasan metodologi penelitian, pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan data, subyek penelitian, kelemahan dan kendala penelitian.
- BAB 4, *Lekra dalam Politik Indonesia 1950-1966*, memuat rangkuman sejarah lahirnya Lekra, visi dan misi Lekra, hubungan Lekra dengan PKI, Lekra dalam aksinya mewujudkan UUPA 1960, Lekra dalam perjuangan perkembangan kebudayaan nasional, ambang kehancuran Lekra, kuasa media.
- BAB 5, *Wacana Anti Komunis dalam Pemberitaan di Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha 1965-1966*, berisi kumpulan artikel dari harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha sejak meletusnya G30S hingga penetapan Tap MPRS XXV tahun 1966.
- BAB 6, *Analisa Wacana Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha 1965-1966*, berisikan analisa hasil studi teks artikel pada bab 5. Hasil analisa ini dilakukan untuk menemukan proses stigmatisasi oleh negara terhadap Lekra melalui kedua harian tersebut.
- BAB 7, *Kesimpulan dan Saran*, berisi kesimpulan tesis dan saran sehubungan dengan hasil analisa.